



PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (1)

Dr. Siti Hamidah

Daru Retnowati, MSi

Eko Murdiyanto, MSi



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kompetensi Khusus:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep pemberdayaan Masyarakat

Mahasiswa memiliki inisiatif, komunikasi lisan, berkooperasi dan kerja dalam tim



Pendahuluan

Istilah pemberdayaan masyarakat mulai muncul di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.



Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya.

Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan.

Pemberdayaan = membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.



Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment mengandung dua pengertian :

1. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
2. *To give power of authority to*, yang berarti member kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan muncul semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.



Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat

1. *“people-centered,*
2. *participatory,*
3. *empowering,*
4. *sustainable.*



Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

- Robinson (1994) : suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.
- Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.



- Payne (1997) pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan



- Totok Mardikanto (2003), pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.



KESIMPULAN

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.

Atau

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Edi Suharto, 2004



Filosofi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan (Slamet,2000)

Oleh karena itu filosofi pemberdayaan dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan.

Ensminger (1962) mencatat ada beberapa filsafat penyuluhan



Di Amerika Serikat dikenal falsafah 3T:

1. *Teach* (pendidikan)
2. *Truth* (Kebenaran)
3. *Trust* (Kepercayaan)

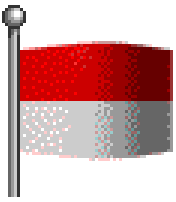
Pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini



Kelsey and Hearne (1955)

Helping people to help themselves

Pemberdayaan merupakan bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia



Ki Hajar Dewantoro (1955)



1. Ing Ngarso Sung Tulodo, mampu memberikan suri tauladan bagi masyarakat sasarnya.
2. Ing Madyo Mangun Karso, mampu membangkitkan inisiatif dan mendorong kreatifitas serta semangat untuk selalu belajar dan mencoba.
3. Tut Wuri Handayani, mau menghargai dan mengikuti keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat selama tidak menyimpang acuan yang ada demi tercapainya perbaikan kesejahteraan hidupnya.



Lao Tzu

(Kredo Pemberdayaan)

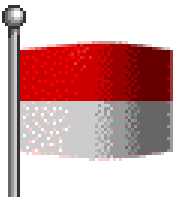
**Pergilah kepada masyarakat, Cintailah mereka,
Belajarlah dari mereka, mulailah dari apa yang mereka mau
Bekerjalah bersama mereka, Bangunlah apa yang mereka punya**

Tetapi bagi pemimpin yang baik,

**Jika semua tugas sudah dilakukan semua, pekerjaan telah
diselesaikan**

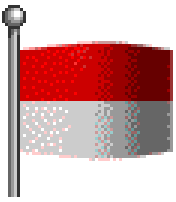
Semua warga masyarakat akan mencatat

“Kami telah melakukan dengan kemampuan kami sendiri”



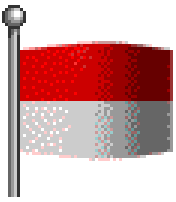
Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan merupakan landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pemberdayaan



Dahama dan Bhatnagar (1980)

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah, sejak keluarga/ kekerabatan.
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.



-
4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya, sehingga harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.

 5. Kerjasama dan partisipasi, artinya akan mengakibatkan perubahan budaya, hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.



-
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan, penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya.

 7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat "belajar sambil bekerja" atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.



-
8. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosialbudaya) sasarannya.

 9. Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.



-
10. Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.

 11. Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.

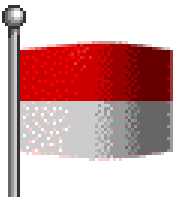


12. Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.



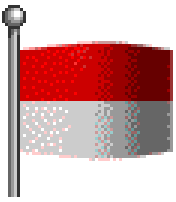
Soedijanto (2001)

1. Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.



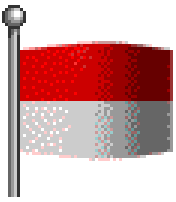
-
3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

 4. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.



-
5. Egaliter, yang menempatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa diirendahkan.

 6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders.



-
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
 8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
 9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.



10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.



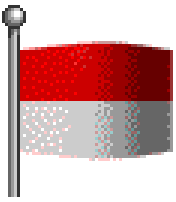
Kesimpulan Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

- 1) **Belajar Dari Masyarakat**
bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.



2) Pendamping sebagai Fasilitator

Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan.

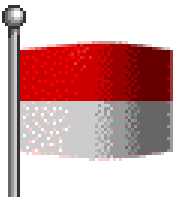


3) Saling Belajar

Pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.



TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Jamasy (2004)



Tujuan Pemberdayaan Masyarakat



1. membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, yang meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Sulistiyani (2004)



Tujuan Pemberdayaan Masyarakat



2. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Tjokrowinoto (2005)



- ekonomi = usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah.
- politik = upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri.
- sosial budaya = upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Tjokrowinoto (2005)



Kesimpulan tujuan pemberdayaan

memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.

- Kemiskinan: pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak (pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi)
- Keterbelakangan: produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.
- Ketidakberdayaan : melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan)



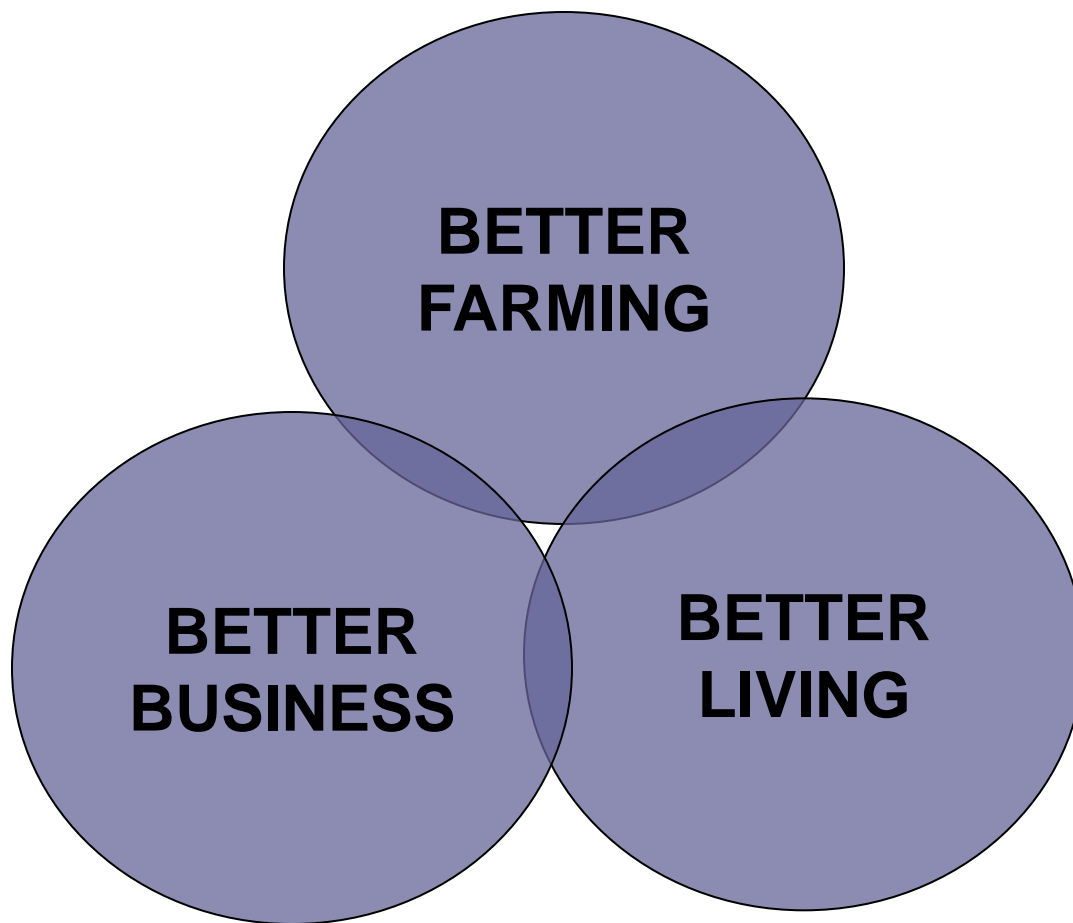
TUJUAN PEMBERDAYAAN BIDANG PERTANIAN



Kartasapoetra (1994)

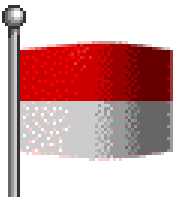
1. Tujuan jangka pendek : untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam aktivitas petani dipedesaan, perubahan-perubahan mana hendaknya menyangkut tingkat pengetahuan, kecakapan atau kemampuan sikap dan motif tindakan petani
2. Tujuan jangka panjang adalah terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat maka hal yang ingin dicapai apabila para petani dalam masyarakat telah melakukan langkah-langkah menuju Better farming, Better business dan Better living

TUJUAN PEMBERDAYAAN BIDANG PERTANIAN





1. Better farming, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha taninya dengan cara-cara yang lebih baik
2. Better business, berusaha yang lebih menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para lintah darat dan melakukan teknik-teknik pemasaran yang benar.
3. Better living, hidup lebih baik dengan mampu menghemat, tidak berfoya-foya dan setelah berlangsungnya masa panen, bisa menabung, bekerja sama memperbaiki Hygiene lingkungan, dan mampu mencari alternatif dalam hal usaha, misal mendirikan industri rumah tangga yang lain dengan mengikutsertakan keluarganya guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu panen berikutnya



untuk mencapai ketiganya diperlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut (Deptan, 2002):

1. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Sebagai contoh, dapat disampaikan pengalaman pelaksanaan Intensifikasi Khusus (INSUS), di mana inovasi-sosial yang dilakukan melalui usahatani berkelompok mampu menembus kemandekan kenaikan produktivitas (*leveling off*) yang dicapai melalui inovasi-teknis.



2. Perbaiki kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community development*)

3. Perbaiki usaha dan lingkungan hidup (*better enviroment*) demi kelangsungan usahataniya. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan kerusakan lingkungan-hidup.



Di samping itu, Mardikanto (2002) menambah satu hal ;

4. Perbaiki aksesibilitas petani dan stakeholders yang lain (*better accesibility*), baik terhadap sumber inovasi, input usahatani (kredit, sarana produksi, alat dan mesin pertanian), pasar dan jaminan harga, serta pengambilan keputusan politik.

Hal ini karena petani-petani di Indonesia pada umumnya termasuk golongan petani gurem dengan ekonomi-lemah, yang lemah dalam permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi, dan lemah semangatnya untuk maju, karena seringkali dijadikan obyek pemaksaan oleh birokrasi maupun penyuluhnya sendiri .

PENGEMBANGAN KAPASITAS

- Pengetahuan teknis
- Sikap kewirausahaan
- Ketrampilan manajerial

KAPASITAS
MUSIA

- Pemilihan komoditas
 - Studi Kelayakan &
 - Perencanaan Bisnis
- Pembentukan Badan Usaha
 - Manajemen
- Pengembangan Jejaring Kemitraan
 -

KAPASITAS
USAHA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KAPASITAS
LING-
KUNGAN

- Lingkungan Fisik
- Lingkungan Sosial
- Lingkungan Kebudayaan
- Lingkungan Kelembagaan

KAPASITAS
KELEM-
BAGAAN

- Kelembagaan Sosial/Adat
- Kelembagaan Ekonomi/Bisnis
 - Kelembagaan Kekuasaan/Birokrasi



S
a
m
p
a
i

Ju
m
p
a

